

## INTISARI

### PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSIS DI MASA PANDEMI COVID-19

**Azzahra Nawadinta\*, Agustinus Supriyanto\*\***

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengungsi oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia saat Pandemi COVID-19. Terdapat hukum internasional sebagai dasar perlindungan pengungsi, yaitu Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia belum termasuk negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga dalam pemenuhan HAM pengungsi menjadi terbatas dan akan menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks jika pengungsi berada di negara Indonesia, yang merupakan negara transit, dalam waktu yang lebih lama pada masa Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai pemenuhan HAM pengungsi di Indonesia oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia saat Pandemi COVID-19 dengan meninjau dari hukum nasional dan internasional.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder dan wawancara sebagai pelengkap data sekunder tersebut. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, dalam pemenuhan HAM pengungsi oleh UNHCR saat Pandemi COVID-19, UNHCR selalu berupaya untuk memenuhi HAM pengungsi sesuai dengan mandat dan tugasnya, terutama terhadap HAM pengungsi yang paling terdampak Pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam pemenuhan HAM pengungsi oleh Pemerintah Indonesia saat Pandemi COVID-19, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta belum memiliki aturan spesifik mengenai pengungsi disaat Pandemi COVID-19, sehingga Pemerintah Indonesia berdasarkan pada aturan yang sama seperti aturan penanganan pengungsi sebelum Pandemi COVID-19, berdasarkan pada ketentuan hukum HAM internasional yang sudah diratifikasi, dan prinsip-prinsip umum hukum internasional terkait pengungsi. Pemenuhan HAM pengungsi oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia saat Pandemi COVID-19, belum sepenuhnya terpenuhi. HAM pengungsi yang sudah terpenuhi haknya saat Pandemi COVID-19 adalah hak untuk mencari suaka. Sementara itu, hak dasar bagi pengungsi, seperti hak pendidikan, hak pekerjaan, dan hak kesehatan, serta aspek penampungan, sudah terpenuhi, namun belum maksimal.

**Kata Kunci :** Pengungsi; Pemenuhan HAM; Hukum Pengungsi Internasional; Pandemi COVID-19

---

\* Penulis adalah Mahasiswa Strata-1 (S1) Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

\*\* Penulis adalah Dosen Strata-1 (S1) Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT

### REFUGEE'S HUMAN RIGHTS FULFILLMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Azzahra Nawadinta\*, Agustinus Supriyanto\*\*

*The purpose of this legal research is to analyze the refugees's rights fulfillment by UNHCR and the Indonesian Government during the COVID-19 Pandemic. There is international law as the basis for refugee protection, namely the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, so that the fulfillment of refugees's rights is limited and will cause problems if refugees are in the transit country, for a longer time during the COVID-19 Pandemic. Therefore, this research raised an issue regarding the refugees's rights fulfillment in Indonesia by UNHCR and the Indonesian Government during the COVID-19 Pandemic by reviewing national and international laws.*

*The method used in this research is normative legal research, using secondary data sources and interview as a complement to the secondary data. The data were analyzed using a qualitative descriptive method.*

*The results of this research are, in fulfilling refugees's human rights by UNHCR during the COVID-19 Pandemic, UNHCR always strives to fulfill the human rights of refugees in accordance with its mandate and duties, especially for the refugees's human rights which are most affected by the COVID-19. Meanwhile, in fulfilling the refugees's human rights by the Indonesian Government during the COVID-19 Pandemic, Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, and does not yet have specific rules regarding refugees during the COVID-19 Pandemic, so the Indonesian Government is based on the same rules as the rules for handling refugees before the pandemic, based on ratified provisions of international human rights law, and general principles of international law regarding refugees. The refugees's rights fulfillment by UNHCR and the Indonesian Government during the COVID-19 Pandemic, has not been fully fulfilled. The human rights of refugees whose rights have been fulfilled during the COVID-19 Pandemic is the right to seek asylum. Meanwhile, the basic rights for refugees, such as the right to education, the right to work, and the right to health, as well as the shelter aspect, have been fulfilled, but have not been maximized.*

**Keywords :** Refugees; Rights's Fulfillment; International Refugees Law; COVID-19 Pandemic

---

\* The author is an undergraduate Student in International Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

\*\* The author is a Lecturer in International Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada